



PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) : SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER

Achmad Rifa'i, Sri Handayani¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study examines the impact of board characteristics on the disclosure of Sustainable Development Goals (SDGs) in primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023. The analysis focuses on female board composition, board size, board independence, board meeting frequency, and expertise diversity, grounded in the Upper Echelons Theory, which posits that top management characteristics influence corporate strategic decisions, including sustainability disclosures.

The research employs multiple linear regression analysis to assess the relationship between these board characteristics and SDGs disclosure. The results indicate that female board composition, board size, board independence, and board expertise diversity significantly affect SDGs disclosure, while board meeting frequency does not demonstrate a meaningful impact.

These findings underscore the importance of gender diversity, larger board sizes, independence, and expertise diversity within boards in enhancing corporate sustainability transparency. This suggests that diverse and independent boards are more inclined to support comprehensive sustainability reporting, contributing to better corporate accountability.

Keywords: Board Characteristics, SDG Disclosure, Upper Echelons Theory, Corporate Governance, Sustainability

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan mendesak di dunia, termasuk kemiskinan, kesenjangan sosial, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim (UN General Assembly, 2015). Implementasi dan pengungkapan SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian Putrananto & Prastiwi (2023) mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan SDGs oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2015–2018 hanya mencapai 38%. Di sektor manufaktur, Dewi et al. (2023) menemukan bahwa pengungkapan SDGs periode 2018–2019 hanya sekitar 34%. Hal serupa juga disampaikan oleh Wicaksono (2023) yang melaporkan bahwa rata-rata pengungkapan SDGs pada enam sektor industri di Indonesia pada tahun 2021 masih di bawah 25%.

Lebih lanjut, Wicaksono (2023) mengklasifikasikan tingkat pengungkapan SDGs ke dalam tiga kategori: rendah (<40%), cukup tinggi (41–60%), dan tinggi (>60%). Berdasarkan kategori tersebut, rata-rata pengungkapan SDGs di Indonesia berada pada tingkat rendah. Selain itu, data dari SDGs Index (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-82 dari 163 negara dengan skor 69,2, menandakan masih perlunya peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mendukung agenda keberlanjutan.

Fenomena ini menjadi lebih signifikan pada perusahaan sektor barang konsumen primer, yang memainkan peran penting dalam rantai pasokan domestik dan internasional. Meskipun sektor ini memiliki dampak besar terhadap isu lingkungan dan sosial, laporan mengenai kontribusi terhadap SDGs sering kali tidak diungkapkan secara menyeluruh (KPMG, 2022). Hal ini

¹ Corresponding author

menunjukkan adanya kesenjangan antara peran strategis sektor tersebut dalam perekonomian dan kontribusinya terhadap keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Dalam skala nasional, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada 2023 angka tersebut masih tercatat sebesar 9,36% (BPS, 2023). Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas, khususnya di wilayah terpencil, masih menjadi hambatan utama dalam mencapai target SDG 4. Di sisi lingkungan, Indonesia masih bergulat dengan deforestasi, degradasi lahan, dan tingginya emisi karbon, yang menghambat pencapaian SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 15 (*Life on Land*) (Rahmawati et al., 2024).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya pengungkapan SDGs di Indonesia adalah praktik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance/CG*), terutama terkait karakteristik dewan komisaris (*board characteristics*). Berdasarkan perspektif *Upper Echelons Theory* yang diperkenalkan oleh Hambrick & Mason (1984), karakteristik manajemen puncak, termasuk dewan komisaris, berpengaruh signifikan terhadap keputusan strategis perusahaan, termasuk pengungkapan informasi keberlanjutan (Hambrick & Mason, 1984; Carpenter et al., 2004).

Teori ini menjelaskan bahwa karakteristik demografis dan psikologis para eksekutif puncak—seperti ukuran dewan, komposisi gender, jumlah rapat, keberagaman keahlian, dan tingkat independensi—mempengaruhi bagaimana perusahaan merespons isu-isu keberlanjutan (Carpenter, Geletkanycz, & Sanders, 2004). Misalnya, dewan komisaris yang lebih beragam secara gender cenderung memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga lebih mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan SDGs (Bear, Rahman, & Post, 2010).

Selain itu, ukuran dewan yang lebih besar sering kali dikaitkan dengan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Dewan yang lebih besar memiliki kapasitas untuk berbagi tanggung jawab secara lebih merata dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan keberlanjutan (Khan, Muttakin, & Siddiqui, 2013). Di sisi lain, independensi dewan komisaris memungkinkan proses pengawasan yang lebih objektif, sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalisasi (Lone, Ali, & Khan, 2016).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan SDGs pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan serta memberikan wawasan bagi regulator dan perusahaan dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan SDGs di Indonesia (Ghozali, 2018)

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Upper Echelons Theory

Upper Echelons Theory yang dikemukakan oleh Hambrick & Mason (1984) menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena teori tersebut menekankan bahwa keputusan strategis perusahaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik manajerial tingkat atas, seperti pengalaman, nilai, dan bias yang dimiliki oleh para eksekutif. Dalam konteks pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs), teori ini menjelaskan bahwa perspektif dan interpretasi manajerial terhadap informasi yang kompleks dan ambigu memengaruhi strategi perusahaan dalam melaporkan kontribusi terhadap keberlanjutan (Carpenter et al., 2004). Karakteristik seperti usia, pendidikan, pengalaman karier, dan keragaman latar belakang manajemen puncak menentukan cara pandang dan preferensi mereka terhadap isu keberlanjutan, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Hambrick, 2007).

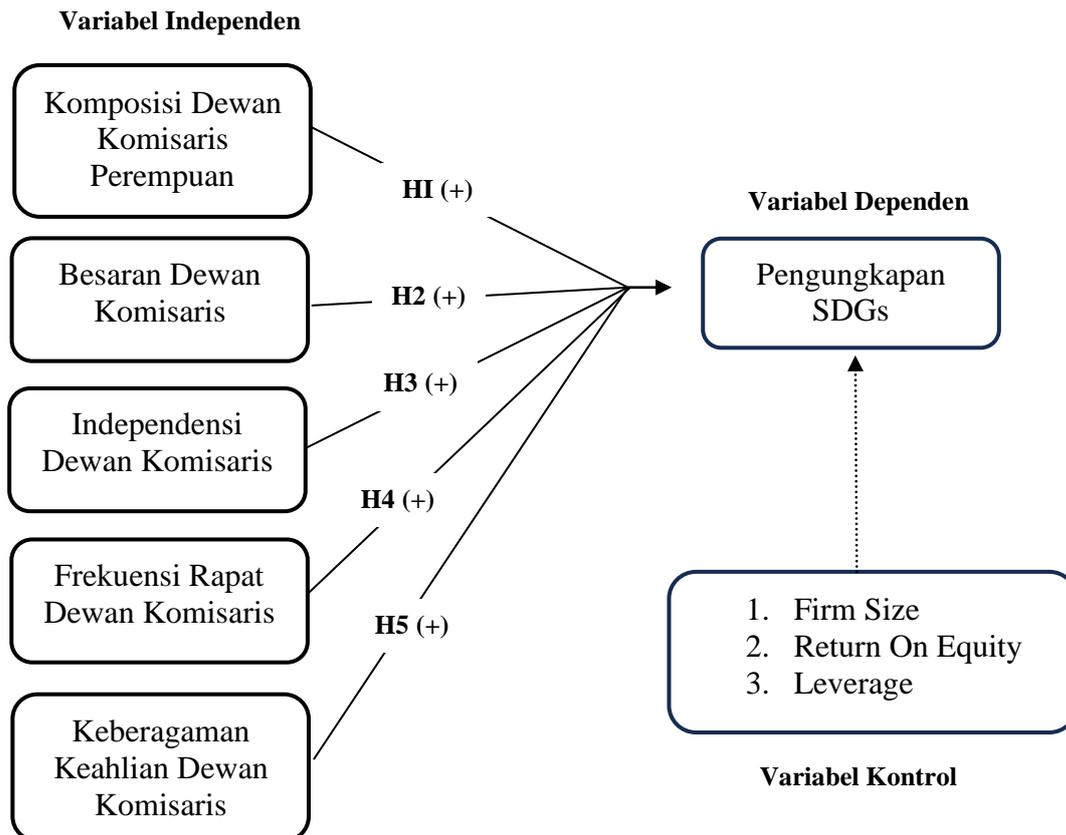
Lebih lanjut, *Upper Echelons Theory* menyoroti bahwa dewan komisaris dengan keragaman gender, besaran dewan, dan independensi yang tinggi cenderung lebih sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pengungkapan SDGs (Bear et al., 2010; Taglialatela et al., 2023). Karakteristik ini memungkinkan manajemen puncak memiliki perspektif yang lebih luas dan mampu menilai dampak keberlanjutan secara lebih

komprehensif. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyebutkan bahwa dewan yang lebih besar dan lebih beragam mampu menyediakan pandangan multidimensi dalam perumusan strategi keberlanjutan (Tagliatalata et al., 2023). Oleh karena itu, teori ini menjadi relevan dalam penelitian yang meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan SDGs pada perusahaan sektor barang konsumsi primer di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Komposisi Dewan Perempuan terhadap Pengungkapan SDGs

Berdasarkan *Upper Echelons Theory* yang dikemukakan oleh Hambrick & Mason (1984), keputusan strategis perusahaan, termasuk pengungkapan keberlanjutan, dipengaruhi oleh karakteristik manajemen puncak, salah satunya adalah komposisi dewan komisaris. Dalam konteks pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), *corporate governance* memainkan peran penting melalui fungsi manajemen dan pemantauan yang mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis (O'Dwyer & Unerman, 2020). Salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan adalah representasi perempuan di dewan komisaris, yang diyakini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mendorong transparansi terkait keberlanjutan (Bush & Zetterberg, 2021; Mehmood et al., 2024). Dias et al. (2024) menegaskan bahwa keragaman gender dalam dewan secara signifikan memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui beragam perspektif yang dihadirkan.

Wanita dalam dewan komisaris sering kali memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga berkontribusi positif terhadap pengungkapan SDGs (Bear et al., 2010). Keragaman gender dinilai penting dalam mempromosikan keberlanjutan secara global, mengingat perempuan umumnya memiliki karakteristik komunal seperti empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial (Manita et al., 2019; Galletta et al., 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan komisaris meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan SDGs, seperti yang diungkapkan oleh Putrananto & Prastiwi (2023), Zampone et al. (2024), Daniel-Vasconcelos et al. (2022), Setyawan et al. (2022), dan Taglialatela et al. (2023). Berdasarkan pada uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Komposisi dewan komisaris perempuan berpengaruh positif pengungkapan SDGs

Pengaruh Besaran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Dewan komisaris merupakan elemen utama dalam pengawasan manajemen perusahaan, yang berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa besaran dewan komisaris dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Jensen (1993) menyatakan bahwa dewan yang lebih kecil lebih efektif karena tantangan komunikasi dan koordinasi yang lebih minim. Namun, perspektif berbeda disampaikan oleh *Upper Echelons Theory*, yang menyatakan bahwa dewan dengan ukuran lebih besar cenderung mencakup lebih banyak sudut pandang dan keahlian, sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespons isu sosial, lingkungan, dan tata kelola secara komprehensif (Hambrick & Mason, 1984). Dukungan terhadap pandangan ini juga ditunjukkan oleh Miranda et al. (2023), yang menemukan bahwa ukuran dewan yang besar memungkinkan berbagai perspektif dalam menghadapi kompleksitas masalah keberlanjutan.

Lebih lanjut, penelitian empiris oleh Putrananto & Prastiwi (2023), Dewi et al. (2023), dan Dosinta et al. (2024) menemukan bahwa besaran dewan komisaris secara signifikan memengaruhi pengungkapan SDGs. Dewan yang lebih besar mampu memperbaiki pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku manajemen, serta menghasilkan kebijakan yang lebih inovatif terkait tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah

H2 : Besaran Dewan Komisaris berpengaruh positif pengungkapan SDGs

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam meningkatkan objektivitas dan transparansi pengungkapan informasi perusahaan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Putrananto & Prastiwi, 2023). Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan diperhatikan dan diwakili dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan *Upper Echelons Theory*, komisaris independen membawa perspektif eksternal yang beragam, sehingga memperkaya wawasan dewan dalam merespons isu keberlanjutan (Hambrick & Mason, 1984). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih selaras dengan tuntutan pasar dan kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan SDGs.

Penelitian empiris oleh Taglialatela et al. (2023) dan Casciello et al. (2024) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen berkontribusi positif terhadap pengungkapan SDGs. Hal ini diperkuat oleh temuan Dewi et al. (2023) dan Putrananto & Prastiwi (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap praktik keberlanjutan. Dengan demikian, berlandaskan teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah

H3 : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif pengungkapan SDGs

Pengaruh Jumlah Rapat Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat keterlibatan dan intensitas pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dewan yang lebih sering bertemu diyakini mampu memperhatikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan secara lebih mendalam, sehingga dapat meningkatkan komitmen terhadap praktik keberlanjutan. Melalui rapat yang rutin, anggota dewan dapat berbagi informasi, mengidentifikasi risiko, dan membahas strategi keberlanjutan perusahaan secara lebih intensif (Putrananto & Prastiwi, 2023). Berdasarkan *Upper Echelons Theory*, rapat dewan menjadi forum strategis di mana keputusan penting terkait pengungkapan SDGs dibahas, sehingga semakin tinggi frekuensi rapat, semakin besar potensi pengawasan dan akuntabilitas terhadap isu keberlanjutan (Hambrick & Mason, 1984).

Penelitian empiris mendukung pandangan ini, di mana frekuensi rapat dewan komisaris terbukti berkorelasi positif dengan tingkat pengungkapan SDGs. Putrananto & Prastiwi (2023) dan Sasanti et al. (2023) menemukan bahwa peningkatan jumlah rapat dewan per tahun berdampak signifikan pada transparansi pelaporan keberlanjutan. Selain itu, studi oleh Nurilhidayah & Wijayanti (2022) juga mengonfirmasi bahwa intensitas pertemuan dewan berhubungan langsung dengan peningkatan pelaporan SDGs. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah

H4 : Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif Pengungkapan SDGs

Pengaruh Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Keberagaman dewan komisaris tidak hanya terbatas pada aspek gender, usia, dan pendidikan, tetapi juga meliputi keberagaman keahlian. Berdasarkan *Upper Echelons Theory* yang dikemukakan oleh Hambrick & Mason (1984), karakteristik manajemen puncak, termasuk variasi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan, memengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keberagaman keahlian dalam dewan komisaris memungkinkan adanya berbagai perspektif dan wawasan dalam menghadapi isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Anggota dewan dengan keahlian yang beragam di bidang manajemen, akuntansi, hukum, atau lingkungan, misalnya, dapat memperkaya diskusi strategis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih optimal terkait pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Hambrick & Mason, 1984).

empiris menunjukkan bahwa keberagaman keahlian dalam dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan SDGs. Lilis Gustiana et al. (2021) menemukan bahwa variasi keahlian di dalam dewan komisaris berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Casciello et al. (2024) dan Lawati & Alshabibi (2023), yang menyatakan bahwa semakin beragam keahlian anggota dewan, semakin baik perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait SDGs. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dirumuskan adalah

H5 : Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris berpengaruh positif pengungkapan SDGs

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian mencakup keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber untuk mewakili seluruh populasi. Perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023 merupakan populasi yang digunakan untuk penelitian ini. Berikut kriteria yang perusahaan manufaktur yang digunakan :

1. Terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Mempunyai data lengkap yang dapat menguji seluruh variabel di penelitian ini, baik yang diterbitkan oleh perusahaan, BEI, atau tercantum pada *website* terpercaya.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Dewan Komisaris Perempuan, variabel independen *Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure*, variabel bebas Besaran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Perempuan, Independensi Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen Pengungkapan SDGs	SDGs	Total pengungkapan SDGs dibagi dengan 17 tujuan SDGs
Variabel Independen Komposisi Dewan Komisaris Perempuan	COMGENDER	Jumlah dewan komisaris Perempuan dibagi dengan jumlah dewan komisaris
Besaran Dewan Komisaris	COMSIZE	Seluruh jumlah dewan komisaris
Independensi Dewan Komisaris	COMINDEP	Jumlah komisaris independen dibagi dengan total komisaris yang dimiliki perusahaan
Rapat Dewan Komisaris	COMMEET	Jumlah rapat dewan komisaris
Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris	COMSKILL	Proporsi keahlian tertentu dari seluruh komisaris yang didasarkan pada pendidikan terakhir komisaris. Maka jika semakin banyak komisaris memiliki keahlian yang berbeda akan memberikan nilai ComEXp yang lebih besar.
Variabel Kontrol Besaran Perusahaan	<i>Firm Size</i>	Jumlah total aset
Profitabilitas	ROE	Pendapatan bersih dibagi dengan total ekuitas
Leverage	Lev	Total liabilitas dibagi dengan total aset

Model Penelitian

Metode analisis data berperan penting dalam membantu peneliti memahami keterkaitan antara berbagai variabel yang diteliti. Hingga saat ini, analisis data merupakan satu satunya metode yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel, memprediksi pengaruh antar variabel, dan menghitung persentase atau nilai rata-rata variabel yang diukur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS.

Deskripsi Sampel Penelitian

Tujuan atas penelitian ini yakni mengetahui apakah terdapat pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan SDGs. Populasi dan sampel yang dipergunakan dalam studi ini yakni perusahaan yang terdaftar pada tahun 2021-2023 di BEI pada sektor barang konsumen primer. Sampel penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan mempergunakan metode *Accidental Sampling*. Dalam penelitian ini, beberapa kriteria dalam pengambilan sampel yakni :

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
1.	Perusahaan yang bergerak sektor barang konsumen primer di BEI	97	111	119	327
2.	Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tidak mempunyai data lengkap yang dapat menguji seluruh variabel di penelitian ini, baik yang diterbitkan oleh perusahaan, BEI, atau tercantum pada website terpercaya.	-29	-44	-59	-132
Total Sampel (n x 3 tahun)					195

Statistik Deskriptif

Variabel komposisi dewan komisaris perempuan (COMGENDER) memperlihatkan rerata sejumlah 0,118797. Berarti rerata perusahaan sampel mempunyai keanggotaan komisaris wanita adalah sebesar 11,88%. Jumlah komposisi dewan komisaris perempuan yang paling kecil yakni senilai 0,00% dan jumlah terbesar adalah sebanyak 1,00 atau 100% dengan standar deviasi 0,1921. Perusahaan yang memiliki komposisi dewan komisaris perempuan terbesar adalah Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) yang di mana mencapai 1,000 pada periode 2023 yaitu memiliki sebanyak 2 dewan komisaris perempuan dari 2 jumlah keseluruhan dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Terdapat 42 perusahaan yang memiliki komposisi dewan komisaris terkecil yang di mana sebanyak 0,000 atau tidak memiliki dewan komisaris perempuan selama periode 2021-2023 diantaranya Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), Andira Agro Tbk (ANDI), Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), BISI International Tbk (BISI), Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA), Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI), Eagle High Plantations Tbk (BWPT).

Variabel independensi dewan komisaris (COMINDEP) memperlihatkan rerata sejumlah 0,4126. Berarti rerata perusahaan sampel mempunyai independensi dewan komisaris sebesar 41,26%. Jumlah independensi dewan komisaris terkecil adalah sebanyak 0,25 atau 25% dan jumlah terbesar adalah sebanyak 0,6667 atau 66,67% dengan standar deviasi sebesar 0,0921. Keberadaan komisaris independen diwajibkan di banyak yurisdiksi untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, GCG). Keberadaan komisaris independen yang efektif adalah kunci dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang semua pihak. Perusahaan yang memiliki independensi dewan komisaris terbesar yaitu Sampoerna Agro Tbk (SGRO) dan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang di mana mencapai 0,6667, SGRO memiliki 2 komisaris independen dari 3 jumlah keseluruhan dewan komisaris yang dimiliki dan UNVR memiliki 4 komisaris independen dari 6 jumlah keseluruhan dewan komisaris yang dimiliki.

Variabel kontrol firm size atau ukuran yang dinilai dari nilai total aset perusahaan memperlihatkan rerata senilai Rp11.074.749.418.836 dengan kisaran nilai sebesar Rp50.993.895.743 hingga Rp186.587.957.000.000 dengan standar deviasi sebesar Rp2.428.242.689.554. Ini memperlihatkan adanya sebaran data yang lebar dari total aset yang dimiliki perusahaan sampel. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum adalah Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada periode 2023 dan yang memiliki nilai minimum adalah Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD) pada periode 2023.

Variabel kontrol profitabilitas yang dinilai dengan ROE memperlihatkan rerata senilai -0,12216. Berarti bahwasanya rerata perusahaan sampel mengungkapkan ada laba negatif dari rugi bersih sesudah pajak yang didapat perusahaan. Nilai ROE berkisar -19,4724 hingga 1,4199 dan dengan nilai standar deviasi 1,5700. Perusahaan yang mempunyai ROE maksimum yakni Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada periode 2023 dan perusahaan yang memiliki ROE minimum yaitu Wicaksana Overseas International Tbk (WICO) pada periode 2023.

Variabel kontrol leverage memperlihatkan rerata senilai 0,5043. Besarnya rasio leverage dari sampel ada pada kisaran nilai 0,0004 hingga 2,3119 dan dengan nilai standar deviasi 0,3206. Ini memperlihatkan ada sebaran data yang lebar dari leverage yang dimiliki perusahaan sampel. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum adalah Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) pada

periode 2022 dan perusahaan yang mempunyai nilai minimum yakni Provident Agro Tbk (PALM) pada periode 2022.

Variabel Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan rata-rata sebesar 0,4723. Jumlah SDGs paling kecil yakni senilai 0,1176 dan jumlah terbesar yakni senilai 1,0000 dengan standar deviasi 0,24632.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
COMGENDER	195	0.000	1.0000	0.11879	0.1921
COMINDEP	195	0.2500	0.6667	0.412697	0.0921084
FIRMSIZE	195	50.993.895	186.587.957.000	11.074.749.418.	2.428.242.689.
		.743	.000	836	554
ROE	195	-19.4724	1.4199	-0.122162	1.5700
LEV	195	0.0004	2.3119	0.504322	0.3206761
SDGs	195	0.1176	1.0000	0.4723	0.24632

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2025

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas berupaya mengevaluasi apakah variabel gangguan atau residual di model regresi terdistribusi yang mendekati normal (Ghozali, 2021). Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) merupakan salah satu metode umum untuk menentukan normalitas (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan dalam tabel 4 nilai signifikansi dari uji K-S yakni 0,054. Nilai tersebut > 0,05, yang mencerminkan bahwasanya data yang dipergunakan di studi ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilaksanakan dengan tujuan mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas di model regresi. Guna mengetahui apakah terjadi multikolinearitas tampak dari nilai VIF yang ada pada setiap variabel seperti terlihat di tabel 4, terlihat nilai VIF tertinggi yakni 1,321, yang menunjukkan bahwa data bebas dari multikolinearitas.

Uji autokorelasi berupaya mengetahui apakah ada korelasi kesalahan pengganggu di periode t dan kesalahan pengganggu di periode sebelumnya (t-1). Table 4 merupakan temuan uji autokorelasi, yang memperlihatkan bahwasanya nilai DW (0,814) < nilai dU (1,8628), ini memperlihatkan bahwasanya pada model penelitian ada gejala autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics		Uji Glejser	
	B	t		Tolerance	VIF	t	Sig.
1	(Constant)	-0.084	-.796	.427		1.313	.191
	COMSIZE	.049	4.967	.000	.779	1.284	.584
	COMGENDER	-.136	-1.674	.096	.942	1.062	.123
	COMINDEP	.663	3.957	.000	.965	1.036	.161
	COMSKILL	.202	1.954	.052	.862	1.160	.069
	COMMEET	-0,01	-.001	.999	.895	1.117	.609
	FIRMSIZE	0	1.293	.198	.757	1.321	.479
	ROE	.019	1.908	.058	.945	1.059	.165
	LEV	-.043	-.880	.380	.940	1.064	.883
F Test			9,690	K-S Test			0,063
F Sig.			0,000	K-S Sig.			0,054
Adjusted R ²			0,264	DW Test			0,814

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2025

Uji Fit Model

Uji statistik F dipergunakan guna melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021). Bila nilai signifikansi $F < 0,05$, maka hasilnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Sebaliknya, bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak ada pengaruh signifikan (Ghozali, 2021). Berdasarkan data pada Tabel 4, nilai signifikansi F adalah 0,000. Karena nilainya $< 0,05$, disimpulkan Besaran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Perempuan, Independensi Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage secara bersamaan memengaruhi signifikan variabel terikat di penelitian ini.

Koefisien determinasi (R^2) dipergunakan guna menilai tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2021). Berlandaskan Tabel 4, nilai R^2 0,264 atau 26,4%. Ini berarti bahwa sebesar 73,6% variasi pada variabel terikat dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan di studi ini.

Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	B	Sig.	Keputusan
H1 : Komposisi Dewan Komisaris Perempuan Berpengaruh Negatif Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	-0,136	0,096	Diterima
H2 : Besaran Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	0,049	0,000	Diterima
H3 : Independensi Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	0,663	0,000	Diterima
H4 : Rapat Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	-0,01	0,999	Ditolak
H5 : Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	0,202	0,052	Diterima

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2025

Pengaruh Komposisi Dewan Perempuan terhadap Pengungkapan SDGs

Pengujian Hipotesis 1 diperoleh hasil bahwasanya Pengujian Hipotesis 5 diperoleh hasil bahwa komposisi dewan komisaris perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tingkat signifikansi 10% ($p\text{-value} < 0,10$). Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris perempuan berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs diterima pada tingkat kepercayaan 90%. Oleh karena itu, **hipotesis 1 diterima**.

Menurut Upper Echelons Theory, karakteristik individu seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan latar belakang profesional akan memengaruhi cara mereka memandang dunia dan membuat keputusan. Dalam hal ini, keberadaan dewan komisaris perempuan diharapkan membawa perspektif yang lebih inklusif, peduli terhadap isu-isu sosial, dan mendukung pengungkapan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Beberapa penelitian empiris juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa keberadaan komposisi dewan komisaris perempuan sering kali secara signifikan mempengaruhi pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk SDGs. Adanya pengaruh yang signifikan dari komisaris independen terhadap pengungkapan SDGs itu bagaimanapun mendukung penelitian sebelumnya oleh (Sekarlangit & Wardhani, 2021), (Zampone et al., 2024)

Pengaruh Besaran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Pengujian Hipotesis 2 diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara Besaran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor barang konsumen primer. Berdasarkan analisis yang disajikan dalam 4.8, menunjukkan bahwa Besaran Dewan Komisaris memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Maka dari itu, **hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.**

Menurut Upper Echelons Theory, besaran Dewan Komisaris berperan penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek keberlanjutan. Dewan yang lebih besar cenderung memiliki keberagaman keahlian, pengalaman, dan perspektif yang lebih luas, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan berbasis berbagai sudut pandang. Besaran dewan komisaris dapat memengaruhi tingkat pengungkapan SDGs melalui peningkatan pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi yang lebih besar terhadap akuntabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Keanggotaan Dewan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen, termasuk dalam hal transparansi dan pengungkapan informasi keberlanjutan. Dewan dengan besaran lebih besar sering kali mencakup anggota yang beragam dalam hal keterampilan, latar belakang, dan pengalaman, yang dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap isu-isu terkait SDGs, seperti tanggung jawab lingkungan dan sosial. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewi et al., n.d.), (Sekarlangit & Wardhani, 2021), (Dosinta et al., 2024).

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Pengujian Hipotesis 3 diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara Independensi Dewan Komisaris dan Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada sektor barang konsumen primer. Berdasarkan analisis yang disajikan dalam 4.8, menunjukkan bahwa Independensi Dewan Komisaris memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Maka dari itu, **hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.**

Menurut Upper Echelons Theory, karakteristik individu seperti independensi anggota dewan komisaris mencerminkan nilai-nilai, pengalaman, dan orientasi mereka terhadap isu-isu penting, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hipotesis yang diterima menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi dewan komisaris, semakin tinggi tingkat pengungkapan SDGs.

Beberapa penelitian empiris juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen sering kali secara signifikan mempengaruhi pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk SDGs. Adanya pengaruh yang signifikan dari komisaris independen terhadap pengungkapan SDGs itu bagaimanapun mendukung penelitian sebelumnya oleh (Putrananto & Prastiwi, 2023), (Tagliatalata et al., 2023b), (Casciello et al., 2024), (Johari et al., 2023). (Sasanti et al., 2023).

Pengaruh Jumlah Rapat Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Pengujian Hipotesis 4 diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara Rapat Dewan Komisaris dan Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada sektor barang konsumen primer. Berdasarkan analisis yang disajikan dalam 4.8, menunjukkan bahwa Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Maka dari itu, **hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak.**

Menurut Upper Echelons Theory, frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat aktivitas pengawasan, diskusi, dan pengambilan keputusan dalam dewan. Namun, hasil penelitian yang menolak hipotesis ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan SDGs. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris yang dilakukan perusahaan cenderung hanya memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh POJK, yaitu setidaknya enam kali dalam setahun. Akibatnya, agenda rapat dewan komisaris tidak secara khusus berfokus pada pembahasan terkait keberlanjutan, diantaranya SDGs.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sekarlangit & Wardhani, (2021) yang menyatakan Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Temuan ini mencerminkan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan SDGs.

Pengaruh Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan SDGs

Pengujian Hipotesis 5 diperoleh hasil bahwa keberagaman keahlian dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tingkat signifikansi 10% ($p\text{-value} < 0,10$). Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa "keberagaman keahlian dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs" diterima pada tingkat kepercayaan 90%. Maka dari itu, hipotesis 5 dalam penelitian ini **diterima**.

Upper Echelons Theory menyatakan bahwa karakteristik dewan komisaris, termasuk keberagaman keahlian, dapat berperan dalam menentukan sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap pengungkapan SDGs. Dewan komisaris dengan latar belakang keahlian yang beragam memungkinkan perusahaan untuk mendapat pengetahuan yang lebih luas, mempertimbangkan risiko dan peluang dari berbagai sudut pandang, serta merespons isu-isu strategis seperti keberlanjutan secara lebih komprehensif.

Hasil penelitian hipotesis ini menunjukkan bahwa keberagaman keahlian komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengungkapan SDGs, organisasi perlu memastikan bahwa Keberagaman Keahlian Dewan Komisaris diisi sesuai bidang keahliannya agar dapat secara efektif untuk mendukung isu-isu penting seperti SDGs. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Casciello et al., 2024), (Lilis Gustiana et al., 2021).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam sektor barang konsumen primer. Objek penelitian ditentukan melalui teknik Accidental Sampling, menghasilkan sejumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023 sebagai sampel akhir.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan dari beberapa karakteristik dewan komisaris, seperti komposisi dewan komisaris perempuan, besaran dewan komisaris, independensi dewan komisaris dan keberagaman keahlian dewan komisaris terhadap pengungkapan SDGs dalam sektor barang konsumen primer. Namun, faktor lain seperti jumlah rapat dewan tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan SDGs di sektor barang konsumen primer masih bergantung pada aspek tertentu dalam tata kelola perusahaan, namun belum sepenuhnya menjadi prioritas perusahaan. Oleh karena itu, keberlanjutan sering kali masih dilihat sebagai isu sekunder, dan keputusan manajerial lebih banyak dipandu oleh faktor tradisional seperti profitabilitas dan efisiensi operasional.



Keterbatasan

Terdapat sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Teknik pengumpulan data pengungkapan SDGs menggunakan analisis konten laporan keberlanjutan atau tahunan perusahaan, yang rentan terhadap subjektivitas peneliti dalam menilai ada atau tidaknya pengungkapan setiap poin SDGs.
2. Masih terdapat banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi pengungkapan SDGs namun belum dimasukkan, seperti kepemilikan institusional, keberadaan komite keberlanjutan, atau peran CEO.

Saran

Mengacu pada keterbatasan-keterbatasan yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. menggunakan *second score* atau orang kedua dalam meneliti topik yang sama sebagai pembandingan hasil.
2. menambahkan variabel lain seperti keberadaan komite keberlanjutan, kepemilikan manajerial, insentif eksekutif, atau reputasi perusahaan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi SDGs.

**REFERENSI**

- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>
- Bătae, O. M., Dragomir, V. D., & Feleagă, L. (2021). The relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: A European study. *Journal of Cleaner Production*, 290. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791>
- Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010a). The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation. *Journal of Business Ethics*, 97(2), 207–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2>
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2020). Advancing research into accounting and the UN Sustainable Development Goals. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(7), 1657–1670. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2020-4556>
- Birindelli, G., Dell’Atti, S., Iannuzzi, A. P., & Savioli, M. (2018). Composition and activity of the board of directors: Impact on ESG performance in the banking system. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124699>
- Carpenter, M. A., Geletkancz, M. A., & Sanders, W. G. (2004). Upper echelons research revisited: Antecedents, elements, and consequences of top management team composition. *Journal of Management*, 30(6), 749–778. <https://doi.org/10.1016/j.jm.2004.06.001>
- Casciello, R., Maffei, M., & Meucci, F. (2024a). Board characteristics and Sustainable Development Goals disclosure: evidence from European state-owned enterprises. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2023-0099>
- Correia, T. de S., & Lucena, W. G. L. (2020). Board of directors and code of business ethics of Brazilian companies. *RAUSP Management Journal*, 55(2), 263–279. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-12-2018-0147>
- Daniel-Vasconcelos, V., Ribeiro, M. de S., & Crisóstomo, V. L. (2022a). Does gender diversity moderate the relationship between CSR committees and Sustainable Development Goals disclosure? Evidence from Latin American companies. *RAUSP Management Journal*, 57(4), 434–456. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-02-2022-0063>
- Denhere, V. (2024). Does Board Gender Diversity Influence SDGs Disclosure? Insight from Top 15 JSE-Listed Mining Companies. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm17100429>
- Dewi, B., Purnama, S., & Prastiwi, A. (n.d.). *International Journal of Multidisciplinary Research and Development* www.allsubjectjournal.com *Corporate governance and sustainability development goals: A manufacturing company evident.* www.allsubjectjournal.com
- Dias, A. I., Pinheiro, P., & Fernandes, S. (2024). Gender diversity and climate disclosure: a tcfD perspective. *Environment, Development and Sustainability*, July. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05203-2>
- Dosinta, N. F., Kurniasih, E. P., Kartika, M., & Leorinita, G. (2024). CORPORATE REPORTING, CORPORATE GOVERNANCE, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DISCLOSURES. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(2), 324–335. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i2.343>
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Tilt, C. (2020a). Sustainable development goal disclosures: Do they support responsible consumption and production? *Journal of Cleaner Production*, 246. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118989>
- Hambrick, D. C. (2007). *UPPER ECHELONS THEORY: AN UPDATE*.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984a). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers[^]. In *Management Review* (Vol. 9, Issue 2).
- Ibrahim, N. A., Howard, D. P., & Angelidis, J. P. (2003). Board Members in the Service Industry: An Empirical Examination of the Relationship Between Corporate Social Responsibility



Orientation and Directorial Type. In *Journal of Global Marketing, and International Journal of Commerce and Management* (Vol. 47).

Johari, N. H., Buniamin, S., Ahmad, N., & Jaffar, R. (2023). The Impact of Board Diversity on Energy-Related SDGs Disclosure in Malaysian Public Listed Companies.

Proceedings of the International Symposium & Exhibition on Business and Accounting 2022 (ISEBA 2022), 28 September 2022, Malaysia, 1, 137–149. <https://doi.org/10.15405/epfe.23081.12>

John, N. A. I., & Angetidis,). (1995). *The Corporate Social Responsiveness Orientation of Board Members: Are there Differences between Inside and Outside Directors?*

Kroll, C., Warchold, A., & Pradhan, P. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs): Are we successful in turning trade-offs into synergies? *Palgrave Communications*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0335-5> 78

Lawati, H. Al, & Alshabibi, B. (2023). Does Board Structure Drive Sustainable Development Goals Disclosure? Evidence From an Emerging Market. *Journal of Governance and Regulation*, 12(2), 166–175.

<https://doi.org/10.22495/jgrv12i2art15>

Lee, C. Y., Wen, C. R., & Thi-Thanh-Nguyen, B. (2024). Board Expertise Background and Firm Performance. *International Journal of Financial Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs12010017>

Miranda, B., Delgado, C., & Branco, M. C. (2023). Board Characteristics, Social Trust and ESG Performance in the European Banking Sector. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm16040244>

Monteiro, S., Lemos, K., & Ribeiro, V. (2022). The Influence of Board Gender Diversity on the Sustainable Development Goals Reporting: Evidence from Portuguese Companies. *Proceedings of the European Conference on Management, Leadership and Governance, 2022-Novem*, 329–339. <https://doi.org/10.34190/ecmlg.18.1.848>

Niestroy, I., Hege, E., Dirth, E., & Zondervan, R. (2019). Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals: good practices and the way forward (Issue February).

Nurilhidayah, R., & Wijayanti, R. (2022). *The Effect of Characteristics and Activities of the Board Of Directors on the Sustainable Development Goals disclosure (Empirical Study on the 100 Largest Companies in Indonesia for the 2020-2021 Period)*. 6(6), 328–337.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, S. (n.d.). *OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*.

Putrananto, A., & Prastiwi, A. (2023). *International Journal of Multidisciplinary Research and Development www.allsubjectjournal.com Sustainable development goals disclosure in the state-owned enterprises: Highlighting the role of the board of commissioners*. 10(11), 109–116. www.allsubjectjournal.com

Sasanti, E. E., Muhsyaf, S. A., & Hendri, S. (2023). Advancing Sustainable Development Goals: The Impact of Corporate Governance Mechanisms and Industry Type on Business Contributions. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 111–121. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i2.3055>

Sekarlangit, L. D., & Wardhani, R. (2021a). The effect of the characteristics and activities of the board of directors on sustainable development goal (Sdg) disclosures: Empirical evidence from southeast asia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13148007> 79

Setyawan, W., Tanzil, N. D., & Rosdin, D. (2022a). Pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGS dalam laporan keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 15–24. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p015>

Strologo, A. Dello, D'Andrassi, E., & Ventimigli, F. (2023). The Prioritization of the SDGs: Analysis of European Policies in Favor of Gender Equality. *Series in Accounting and Business Administration*.

Tagliatalata, J., Pirazzi Maffiola, K., Barontini, R., & Testa, F. (2023a). Board of Directors' characteristics and environmental SDGs adoption: an international study. *Corporate*



Social Responsibility and Environmental Management, 30(5), 2490–2506.
<https://doi.org/10.1002/csr.2499>

UN General Assembly. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Vol. 1, Issue October). <https://doi.org/10.54648/ecta2007029>

van der Heijden, J. (2013). Is New Governance the Silver Bullet? Insights from the Australian Buildings Sector. *Urban Policy and Research*, 31(4), 453–471.
<https://doi.org/10.1080/08111146.2013.769156>

van der Waal, J. W. H., Thijssens, T., & Maas, K. (2021). The innovative contribution of multinational enterprises to the Sustainable Development Goals. *Journal of Cleaner Production*, 285. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125319>

Wicaksono, A. P. N. (2023). Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 125–156.

<https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>

Widuto, A. (2022). *Sustainable Development Goals (SDGs) in EU regions*. European Parliamentary Research Service.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659415/EPRS_BRI\(2020\)659415_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659415/EPRS_BRI(2020)659415_EN.pdf)

Zamponi, G., Nicolò, G., Sannino, G., & De Iorio, S. (2024a). Gender diversity and SDG disclosure: the mediating role of the sustainability committee. *Journal of Applied*

Accounting Research, 25(1), 171–193. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2022-0151>